



PENGARUH IMPLEMENTASI SIPD TERHADAP KINERJA PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Malasari Dewi, Nia Sumiati, Warman Suryaman

Program Studi Administrasi Publik, STIA Bandung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Implementasi Sistem Informasi Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory research. Sampel penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebanyak 36 orang. Pengolahan data menggunakan software SPSS 23.0. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan.

Kata Kunci: Implementasi, Keuangan, Kinerja, Pengelola, SIPD.

PENDAHULUAN

Sistem informasi saat ini berkembang dengan pesat dan makin bernilai tinggi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang dapat berjalan secara online memudahkan penggunaannya untuk mengakses data dimana saja dan kapan saja serta sistem informasi yang dibangun dengan tepat akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Itulah yang saat ini

dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Untuk mendapatkan informasi tentang pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan di daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi melaksanakan konsep E-Government untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat serta memantau perkembangan antar

instansi pemerintah. Sistem informasi ini berjalan secara online, efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari pusat yang akan memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data informasi yang diinginkan dimana faktor kelengkapan, ketepatan, keakuratan dan validasi data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data melalui sebuah sistem data dan informasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Deseverians & Wulandari, 2020).

Sistem informasi ini berfungsi untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat juga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah khususnya di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. SIPD merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah (Akhmad et al, 2017).

Rencana pembangunan di tingkat pusat serta daerah mempunyai gagasan penting tentang harmonisasi dalam mewujudkan visi, misi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bangda mengatur penggunaan SIPD agar dilaksanakan pada semua pemerintahan umum serta lingkungan wilayah/daerah yang

dikelola negara. Dalam pemanfaatan SIPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi khususnya di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cimahi masih terdapat sejumlah kendala pelaksanaannya. Secara menyeluruh variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kerangka data SIPD pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi adalah tingkat kesiapan inovasi (readiness). Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Badan pengelolaan keuangan bertugas untuk merumuskan kebijakan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, merumuskan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan melaksanakan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan keuangan pemerintah (Hanafiah, 2016).

Kinerja Pengelola keuangan yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang aparatur/pegawai pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek

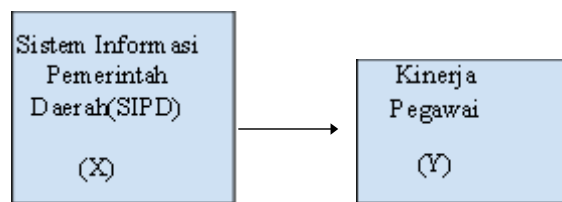
tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform. Proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui admin perencanaan dan admin penganggaran dalam menentukan waktu yang akan digunakan dalam SIPD, dimana proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang bertujuan untuk menerima masukan atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diakhiri dengan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses Perencanaan dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan sampai dengan selesai berdasarkan jadwal dalam sistem SIPD yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Kinerja Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara profesional seperti yang terdapat didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang

dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi (Kurnianto, 2018). Kinerja dapat diukur dan dilihat dari indikator-indikator yang berkaitan dengan kinerja pegawai itu sendiri. Menurut Robbins (2006) dalam Lie (2018) mengemukakan bahwa dimensi dan indikator kinerja dapat diukur dengan 1) Kualitas Kerja, 2) Kuantitas Kerja, 3) Tanggung jawab, 4) Kerjasama dan Inisiatif.

Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka pemikiran yang diambil berdasarkan hasil uraian teoritis:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang ditetapkan dalam penelitian atau dengan kata lain merupakan jawaban teoritis namun belum menjawab secara empirik. Adapun hipotesis yang diterapkan oleh peneliti adalah "Terdapat Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi".

Dikarenakan penelitian ini akan menggunakan analisis data statistik dari sampel yang diambil, maka hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

- $H_0: \rho = 0 \rightarrow$ Tidak Adanya Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
- $H_1: \rho \neq 0 \rightarrow$ Adanya Pengaruh

Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan Adanya Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory research). Menurut Sugiyono (2017) dalam Lestari & Sunarsih (2020) mengatakan bahwa penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Karena alasan utama dari penelitian eksplanatori adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan melalui penelitian ini dapat dijelaskan hubungan dan pengaruh dari variabel-variabelnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah penelitian yang dilakukan pada suatu populasi dengan menganalisis data yang diperoleh dari populasi itu sendiri. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang terdiri dari 36 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji statistik regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah

dijabarkan dalam diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah yaitu Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Kinerja Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian regresi pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Kinerja Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.672a	.451	.435	7.509

Predictors: (Constant), Implementasi SIPD
Dependent Variable: Kinerja
sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel Implementasi SIPD menghasilkan nilai R Square sebesar 0,451 yang berarti bahwa Implementasi SIPD berpengaruh terhadap Kinerja Pengelola Keuangan sebesar 45,1%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 54,9%.

Tabel 2. Hasil Uji Anova (F) Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Kinerja Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1575.741	1	1575.741	27.945	.000a
Residual	1917.148	34	56.387		
Total	3492.889	35			

Predictors: (Constant), Implementasi SIPD
Dependent Variable: Kinerja
sumber: data primer diolah

Jika diperhatikan hasil uji Anova pada Tabel 2 di atas dapat pula dilihat bahwa hasil signifikansi pengaruh

menunjukkan angka 0,000a yang artinya kebenaran kesimpulan hasil uji regresi ini dapat dipercaya sampai 100%.

Pembahasan

Hasil penelitian tentang pengaruh implementasi SIPD terhadap kinerja pengelola keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh, secara simultan pengaruh implementasi SIPD terhadap kinerja pengelola keuangan menghasilkan angka signifikansi 0,000 dengan nilai R Square sebesar 0,451. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusinya terhadap pengelolaan keuangan adalah sebesar 45,1%. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan implementasi SIPD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

Dari penelitian ini dapat memperkuat dan ikut membuktikan teori-teori dan temuan penelitian yang telah dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Dona Primasari (2017) bahwa implementasi SIKD dapat membantu pekerjaan lebih efisien selaras dengan kesesuaian tugas, sehingga disimpulkan bahwa penerapan SIKD akan meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Sri Asyrafil Mustaqmah (2022) yang menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya hasil dari penelitian Rasyidah Nadir, dkk (2021) juga dapat memperkuat dan membuktikan teori ini yang berpendapat bahwa pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah akan tinggi jika memiliki sistem informasi pemerintah daerah dan komitmen

organisasi yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi SIPD secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Secara simultan variabel implementasi SIPD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan dalam penatausahaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yaitu sebesar 45,1%. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel implementasi SIPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan dalam penatausahaan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dengan kontribusi sebesar 45,1%. Sementara sisanya 54,9% belum dimaksimalkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Dengan demikian disarankan kepada seluruh pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi agar lebih memahami maksud dan tujuan dari pengimplementasian SIPD. Apabila Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi kurang memahami maksud dan tujuan dari SIPD tersebut maka kinerja pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi belum dapat dicapai dengan maksimal. Selanjutnya disarankan kepada Pemerintah Kota Cimahi agar lebih memberikan perhatian yang serius terhadap implementasi SIPD sehingga permasalahan dalam pengelolaan keuangan tidak terjadi.

Peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih memiliki

kelemahan, oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian ini dengan melibatkan variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan khususnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*, 7(1), 89-103.

Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 13-30.

Hanafiah, R. R., Abdullah, S. A. S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(4).

Lestari, M., & Sunarsih, U. (2020). *Pengaruh Rasio Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Pengungkapan Islamic Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating (Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018)* (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta).

Lie, T. F. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja pada CV. Union Event Planner. *Agora*, 6(1).

Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(2), 181-197.

Nadir, R., Tawakkal, T., Yusrianti, E., & Arsyad, M. (2021). Pengaruh Implementasi

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemda Kabupaten Wajo). *In Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (Vol. 6, No. 1, pp. 127-132).

Pemerintah Pusat. (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>(20 Desember 2022)

Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah*. Tersedia di : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (20 Desember2022).

Primasari, D. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 153-166.